



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HAIRIDA
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 248085

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 618.401.600

1. Tanah Seluas 485 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , WARISAN Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/34 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , WARISAN Rp. 30.000.000
5. Tanah Seluas 440 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , WARISAN Rp. 400.000.000
6. Tanah Seluas 844 m2 di KAB / KOTA LANDAK, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.401.600

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 416.530.000

1. MOTOR, HONDA K1H02N14LO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 21.500.000
3. MOBIL, HONDA HR-V 1.5 L E CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 385.030.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 350.463.658



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.385.395.258
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.385.395.258

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.